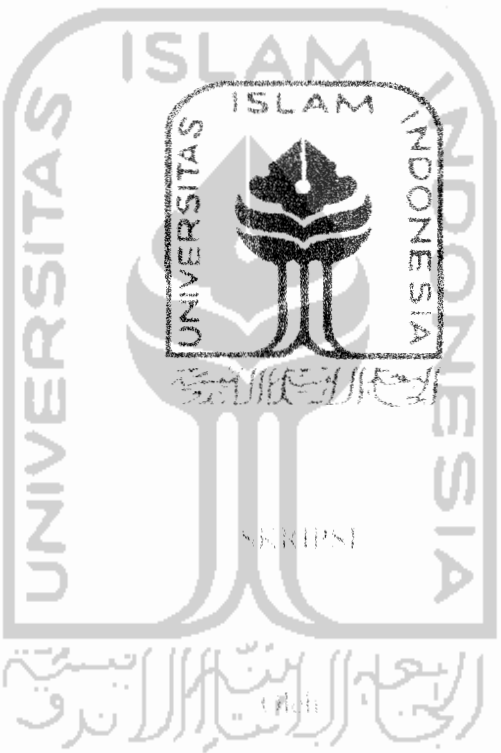
PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



SKRIPSI

Nama : Jaeza

Nomor Mahasiswa : 03312222

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian salah satu syarat untuk
memperoleh derajat Sarjana Strata 1 program Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : [redacted]
Nomor Mahasiswa : [redacted]

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006

PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : [illegible]
Nomor Mahasiswa : [illegible]2222
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : April 2006
Dosen Pembimbing

(Aziz Rahman, SE, MBA)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Disusun Oleh: JAGAT
Nomor mahasiswa: 00312222

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 15 Mei 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com .....

Penguji : Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

Halaman Persembahan

Penulis menulis hal
ini sebagai persembahan untuk :

- *Mamah Tercinta Hj. Yanti Damayanti, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dengan kasih sayang, doa dan perhatian sepanjang hidup*

  "I Love U so Much Mamah"

- *Bapak Tersayang "Komandan" H. Anan Suherlan, S.sos, M.Si*

  yang telah mendidik dan mengajarkan dirinya seperti sekarang ini.

  "Hatur Nuhun Pisan Pap for Everyt' U do"

- *Adik adikku Tersayang, Meyta dan Bintang*

  yang telah menjadi teman dan adik yang baik.

  "Terimakasih atas Senyum dan Dukungan kalian Adik-adik Sayang"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu alaikum Wr. Wb

Subhanallah segala puji bagi Allah penscipta semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah puji syukur hanya kepada Allah atas terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kebenaran sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman dan Islam.

Banyak hambatan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah Allah memberikan banyak sekali kemudahan sehingga hambatan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Hanya atas izin Allah skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan berpikir penulis dan menjawab pertanyaan penulis mengenai akuntansi sektor publik yang sangat diminati dan digeluti oleh penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak bisa tersusun dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Mamah dan Adik-adikku tercinta yang senantiasa berdoa dan memberikan tegurun dukungan motivasi dan semangat pada penulis.
2. Bapak Arief Rahman yang telah membimbing penulis menyusun skripsi ini, terima kasih atas diskusi, saran serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul ... i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ... ii

Halaman Pengesahan ... iii

Halaman Berita Acara Ujian ... iv

Halaman Persembahan ... v

Motto ... vi

Kata Pengantar ... vii

Daftar Isi ... ix

Daftar Tabel ... xii

Daftar Gambar ... xiii

Daftar Lampiran ... xiv

Abstraksi ... xv

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.5 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1 Pengertian Partisipasi 7
2.2 Pengertian Transparansi Kebijakan Publik 8
2.3 Pengertian Anggaran 9
2.4 Fungsi dan Manfaat Anggaran 11
2.5 Pengertian Keuangan Daerah (APBD) 13
2.6 Norma dan Prinsip - prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 16
2.7 Pendekatan Dalam Proses Anggaran 17
2.7.1 *Top Down Approach* 19
2.7.1 *Bottom-Up Approach* 19
2.7.2 *Mixture Approach* 20
2.8 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21
2.8.1 Landasan Hukum Penyusunan APBD 21
2.8.2 Proses Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Serang 22
2.9 Penelitian Terdahulu 26
BAB III METODE PENELITIAN 27
3.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Serang 27
3.2 Variabel Penelitian 32
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 32
3.4 Metode Pengumpulan Data 34
3.4.1 Jenis Data 34
3.4.2 Alat Pengumpul Data 35

3.4.2.1. Kuesioner Daftar Pertanyaan ... 35
3.4.2.2. Skala Likert ... 35
3.4.2.3. Uji Validitas dan Reliabilitas ... 36
3.5. Metode Analisis Data ... 43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... 41
4.1. Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden ... 41
4.1.1. Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat ... 41
4.1.2. Analisa Variabel Transparansi Kebijakan Publik ... 47
4.2. Pembahasan ... 51
4.2.1. Pembahasan Variabel Partisipasi Masyarakat ... 51
4.2.2. Pembahasan Variabel Transparansi Kebijakan Publik ... 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 53
5.1. Kesimpulan ... 53
5.2. Saran ... 54
5.2.1. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ... 55
5.2.2. Saran Untuk Penelitian Berikutnya ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1 Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Serang	28
3.2 Rangkuman APBD Kabupaten Serang Tahun 2014	31
3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat	38
3.4 Hasil Uji Validitasi Variabel Transparansi Kebijakan Publik	38
3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat	39
3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Proses perencanaan dan pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik	15
2.2 Alur Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran menurut UU Keuangan Negara	24
2.3 Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD Menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2002	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hal

1 Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik . . . 50

2 Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik . . . 50

3 Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat . . . 50

4 Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat . . . 50

5 Frequency Table Partisipasi Masyarakat . . . 61

6 Frequency Table Transparansi Kebijakan Publik . . . 62

7 Frequency Table . . . 64

8 Rekapitulasi Kuesioner . . . 65

9 Kuesioner Partisipasi Masyarakat . . . 67

10 Kuesioner Transparansi Kebijakan Publik . . . 68

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Populasi penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Serang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah panitia anggaran eksekutif (PAE).

Kuisioner digunakan sebagai data primer dengan menggunakan skala likert dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah **baik**.

Kata kunci : Persepsi, Partisipasi masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, APBD, Panitia Anggaran Eksekutif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi kewenangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR nomor XV MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pemerintah telah menggulirkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanan otonomi daerah dan desentralsasi yang luas nyata dan bertanggungjawab. Jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka, akan tetapi daerah saat ini dituntang kesiapannya baik secara kelembagaan

sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat menyelidiki otonomi dan desentralisasi secara nyata bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan dibandingkan mereka *institutional reform*.

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah implikasi kedua undang-undang tersebut adalah pertama dilakukan reformasi anggaran (*budgetary reform*) sistem pembayaran (*payment reform*) sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta sistem manajemen keuangan daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (*public money*) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan efektif efisien terarah terencana terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* Pemerintahan Daerah.

World Bank memberikan definisi *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*." sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "*the exercise of political economic and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*." Dalam hal ini

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat sedangkan *UNDP* lebih menekankan pada aspek politik ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan *(policy strategy formulation) Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan pendapatan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan jika mengacu pada *World Bank* dan *UNDP* orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*.

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul " **Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah** "

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut diatas.

1. Untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD
2. Untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD

1.4. Manfaat Penelitian

Bagi penulis sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi serta untuk menganalisa dan pengetahuan dan menerapkan ilmu dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik (ASP) yang telah didapatkan selama kuliah.

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ANSP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

Sementara bagi pemerintah daerah kabupaten Serang diharapkan menjadi masukan dalam membidangi pelaksanaan otonomi daerah. Khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan skripsi penulis akan menyajikan sistematika penulisan serta dua lima belaknag bangan kesimpulan yang akan diambil oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang masalah Rumusan masalah Tujuan penelitian Manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi Pengertian partisipasi pengertian transparansi pengertian keuangan daerah (APBD) dan teori-teori terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Populasi dan sampel penelitian Sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan alat analisis yang digunakan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan atas hasil pembahasan dan Saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para *stakeholder* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas insiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank 1996) Partisipan bukan merupakan aktor tunggal. Pemerintah Pusat, Menteri, DPR Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi-organisasi publik, pihak-pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff,2002)

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk antara lain melalui wakil-wakil rakyat yang ada dewan (DPRD). Melalui wakil-wakil rakyat aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah daerah. Selain hal tersebut didalam masa reses anggota dewan melakukan proses *hearing* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) hasilnya kemudian dituangkan dan disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang digunakan sebagai salah satu acuan didalam proses penyusunan APBD. Pemerintah daerah pun memiliki kotak Pos Pengaduan Masyarakat yang dikangani oleh Bagian Humas Pemda yang menerima pengaduan, kritikan maupun usulan dalam bentuk surat tertulis secara langsung dari masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada kepala Daerah dalam bagian kunjungan kerja yang berlangsung tiap

satu minggu sekali. Kepala Daerah juga membuka pengaduan keluhan ataupun usulan melalui Layanan Pesan Singkat SMS (*Short Message Service*). Kemudian masyarakat pun dapat melakukan unjuk rasa demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi.

2.2. Pengertian Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi atau keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan dinvasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *hazzonal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara relas terakomodasikan pada undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme. UU nomor 22 Tahun 1999, misalnya mengatur hal keterbukaan pertanggungjawaban di pada pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1. Babkan dalam UU nomor 28 Tahun 1999 ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan yang tentunya termasuk tentang keuangan. Informasi dimaksud mestinya dihasilkan dari sebuh sistem akuntansi yang sesuai.

Menurut Mardiasmo (2005:9) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban (Kepala Daerah) yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.3.Pengertian Anggaran

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah Kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan mulai dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Glenn A. Welsch (1995:5) mengemukakan bahwa anggaran adalah suatu bentuk *statement* daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai pemimpin *action future* dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury (1996), bahwa anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang disyaratkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja.

Serta menurut M. Mursyid (1993) memberikan definisi bahwa Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak menyediakan jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

1. Merupakan informasi atau pernyataan.
2. Rencana atau rancangan kebijaksanaan bidang keuangan.
3. Dari suatu pemerintah, organisasi atau badan usaha.
4. Untuk suatu periode waktu tertentu umumnya 1 tahun.
5. Merupakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah menetapkan peran sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, stabilisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas-aktivitas berbagai unit kerja.

2.4. Fungsi dan Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo,2002) yaitu:

1. Sebagai Alat Perencanaan

   Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk menerjemahkan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.

2. Alat Pengendalian

   Anggaran digunakan untuk mengendalikan (memberikan kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi kekurangan dan pelaksanaan operasional program. Karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan, pengeluaran dan pengeluaran pemerintah sehingga perbedaan yang terjadi dapat dikoreksi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Alat kebijakan Fiskal

   Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong

mentasibitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4 Alat Politik.

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

5 Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.

6 Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7 Alat Motivasi.

Anggaran haruslah bersifat menantang, tetapi dapat dicapai (*challenging but attainable*) atau mentuntut, tetapi dapat diterapkan (*demanding but achievable*) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Anggaran menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu:

1 Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

3. Anggaran diperlukan untuk mewujudkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik.

Perencanaan dan pengendalian manajerial merupakan suatu proses siklus yang berlanjut dan saling berkesinambungan, sehingga salah satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Kenes dan Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap yaitu:

1. Perencanaan tujuan dan susunan dasar

   Merupakan proses penurunan tujuan dasar dari organisasi yang tergambarkan dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan ini dilakukan diluar dari perencanaan operasional. Perencanaan ini dirumuskan dan disusun oleh manajemen tingkat atas dan merupakan proses perencanaan yang rumit dan pelik karena menyangkut keberlangsungan organisasi dan terkait dengan harapan dan tujuan dasar organisasi.

2. Perencanaan operasional.

Merupakan perencanaan yang dirumuskan dan disusun untuk terciptanya tujuan dan sasaran dasar organisasi.

3. Penganggaran

Adalah proses penyusunan anggaran untuk mendukung perencanaan operasional yang telah disusun serta untuk melaksanakan tujuan-tujuan dan target-target organisasi dalam jangka pendek (kegiatan operasional).

4. Pengendalian dan pengukuran

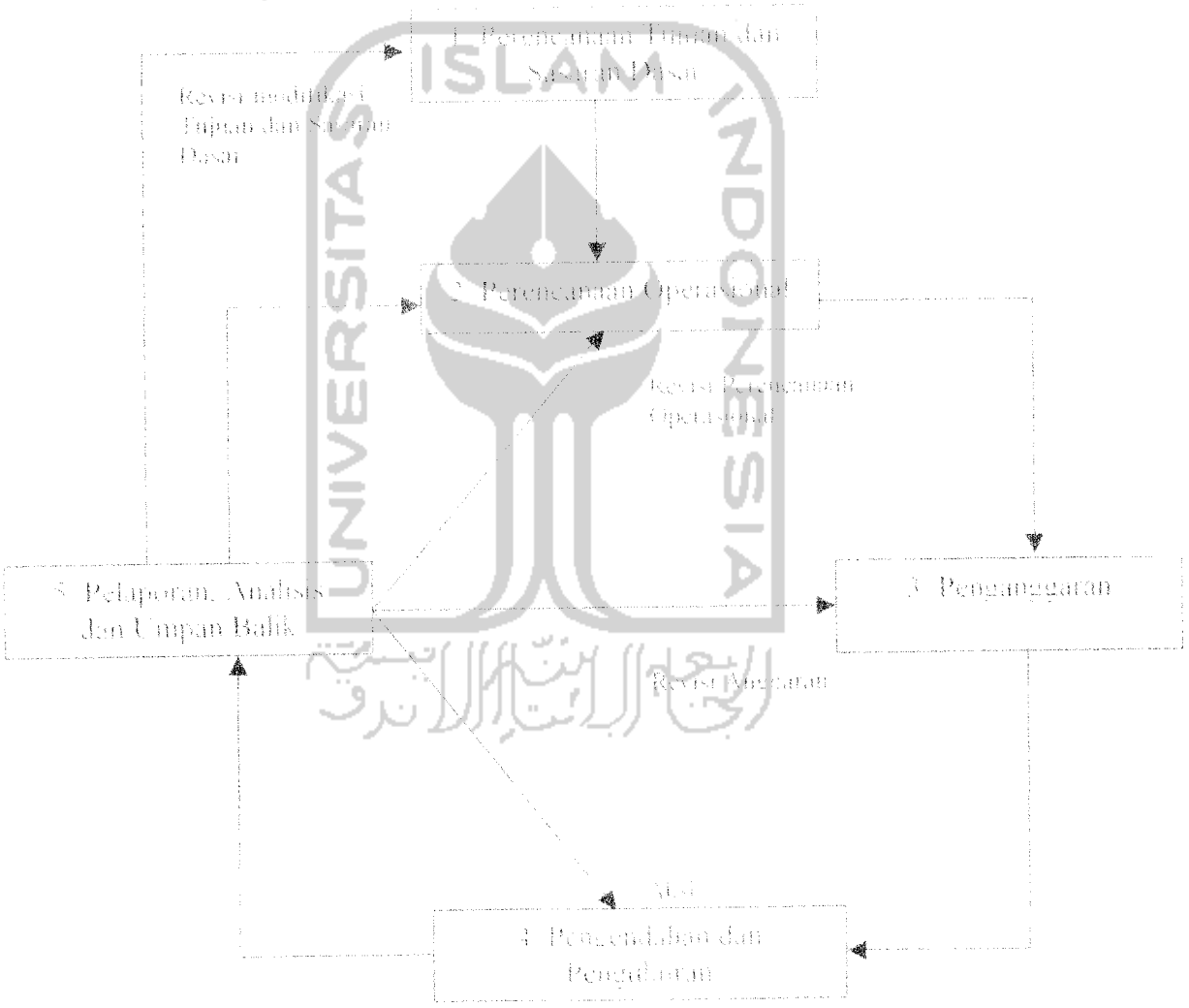
Proses pengendalian pengawasan dan pengukuran atas anggaran yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Merupakan proses pelaksanaan tujuan-tujuan dan target-target jangka pendek organisasi (kegiatan operasional).

5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.

Merupakan proses akhir dari siklus perencanaan dan pengendalian manajerial. Terdiri atas proses pelaporan hasil kegiatan operasional yang telah dicapai selama periode berlangsung, analisa atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan yang gagal dilaksanakan. Serta umpan balik untuk pelaksanaan kegiatan periode berlangsung ataupun periode berikutnya.

Siklus perencanaan dan pengendalian manajerial tersebut diilustrasikan dengan gambar 2.1

Gambar 2.1 Proses perencanaan dan pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik



2.5. Pengertian Keuangan Daerah (APBD)

Dalam pasal 1 PP No 105 tahun 2000 pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Rexinsond Bassar, 1999).

Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana "negara" dianalogikan dengan "daerah". Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu hak yang menguji barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan, 1997).

2.6. Norma dan Prinsip - prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab (*good governance*). Sejalan dengan "*code of good practice on fiscal transparency*" yang diperkenalkan oleh IMF maka dalam proses pengembangan wacana publik sebagai salah satu komponen kunci

pengelolaan anggaran daerah masyarakat perlu diberikan keleluasaan untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu anggaran harus mampu memberikan informasi yang lengkap akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat pemerintah internal dan pengelolaan pusat.

2 Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berlandaskan azas efesiensi tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan dana harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan terutama untuk program yang diajukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan proyek yang belum tidak tersedia kredit anggarannya serta tidak boleh melebihi kredit plafon anggaran yang telah ditetapkan.

3 Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah dibebankan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat.

4. Efesiensi dan efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan penmgkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

5. Format Anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit (*deficit budget approach*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila tenadi surplus dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

2.7. Pendekatan Dalam Proses Anggaran

Pendekatan dalam proses penganggaran adalah suatu cara atau metode yang ditempuh dalam menyiapkan, menuniskan, dan menyusun anggaran. Dalam pendekatan ini akan tergambar arah atau arus dari proses persiapan, penuangan dan penyusunan anggaran, akan tergambar pula mengenai asal atau sumber usulan dan kearah mana instansi tersebut dilaksanakan

2.7.1. *Top Down Approach*

Adalah rencana, program maupun anggaran ditentukan sepenuhnya oleh unit kerja yang tertinggi tingkatannya sedangkan unit unit kerja dibawahnya hanya sekedar melaksanakan, tanpa mempertimbangkan usulan dari unit kerja dibawahnya

Kebaikan pendekatan ini koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja akan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan karena disusun oleh pihak-pihak yang melakukan koordinasi dan pengawasan

Kelemahannya adalah unit kerja yang tertinggi sering kali tidak dapat menuniskan rencana anggaran atau rencana kerja yang benar-benar memenuhi keinginan dan kebutuhan unit kerja yang lebih rendah, sehingga akan sulit untuk dilaksanakan

2.7.2. *Bottom-Up Approach*

Pada pendekatan ini cara atau metode yang digunakan dalam mempersiapkan merencanakan dan menuniskan anggaran dimulai dari tingkat jenjang

organisasi terbawah mengarah secara bicarks ke tingkat jenjang yang lebih tinggi

Kebaikan dari anggaran ini adalah bahwa rencana kerja yang disusunkan oleh unit kerja terbawah menggambarkan kenyataan dan kebutuhan yang nyata (realistik)

Kelemahan dari pendekatan *bottom-up* ini adalah sering kali terjadi bahwa unit kerja terkecil terbawah mempunyai kemampuan yang berbeda beda dalam menyusun rencana kerja sehingga mutu hasil rencana bervariasi dan kadang sulit untuk berkoordinasi sehingga waktu penyusunan menjadi lebih lama. Kelemahan lainnya dimana usulan rencana kerja dengan beban rencana yang sangat tinggi sementara dana sangat terbatas sehingga tidak dapat dibiayai hal ini menimbulkan kekecewaan dan apatisme di kalangan unit unit yang mengusulkan

2.7.3. *Mixture Approach*

Pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan *Top Down* dan Pendekatan *Bottom-Up* yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua level dalam organisasi dalam penyusunan dan perumusan yang sejelas-jelasnya. Unit kerja diatas cukup mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana dan program sesuai dengan pedoman yang telah digariskan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari pendekatan *Top Down* ataupun *Bottom-Up* dengan harapan akan memperoleh hasil yang paling baik

2.8. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.8.1. Landasan Hukum Penyusunan APBD

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Bab III tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bagian Pertama pasal 17 ayat (1) menyebutkan "Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD" Pasal 17 ayat (2) menyebutkan "Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan dengan penjaringan aspirasi masyarakat berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri" Pasal 18 ayat (1) menyebutkan "Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD" Pasal 19 ayat (1) menyebutkan "Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program Kegiatan dan Anggaran" Pasal 19 ayat (2) menyebutkan "Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja" Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Usulan Program Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja" Pasal 20

ayat (2) menyebutkan "Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah" Pasal 20 ayat (3) menyebutkan "Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah " Pasal 20 ayat (4) menyebutkan "Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD"

2.8.2. Proses Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Serang

Berdasarkan instruksi Bupati Serang tentang penyusunan anggaran (2005) Anggaran tahunan dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang berupa rencana kerja pemerintah daerah kemudian DPRD bersama dengan Bupati menyepakati Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD tahun anggaran 2006 dan menetapkan strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2006. Berdasarkan instruksi penyusunan anggaran berbasis kinerja Satuan Kerja pengguna anggaran menyusun usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan disampaikan kepada Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL).

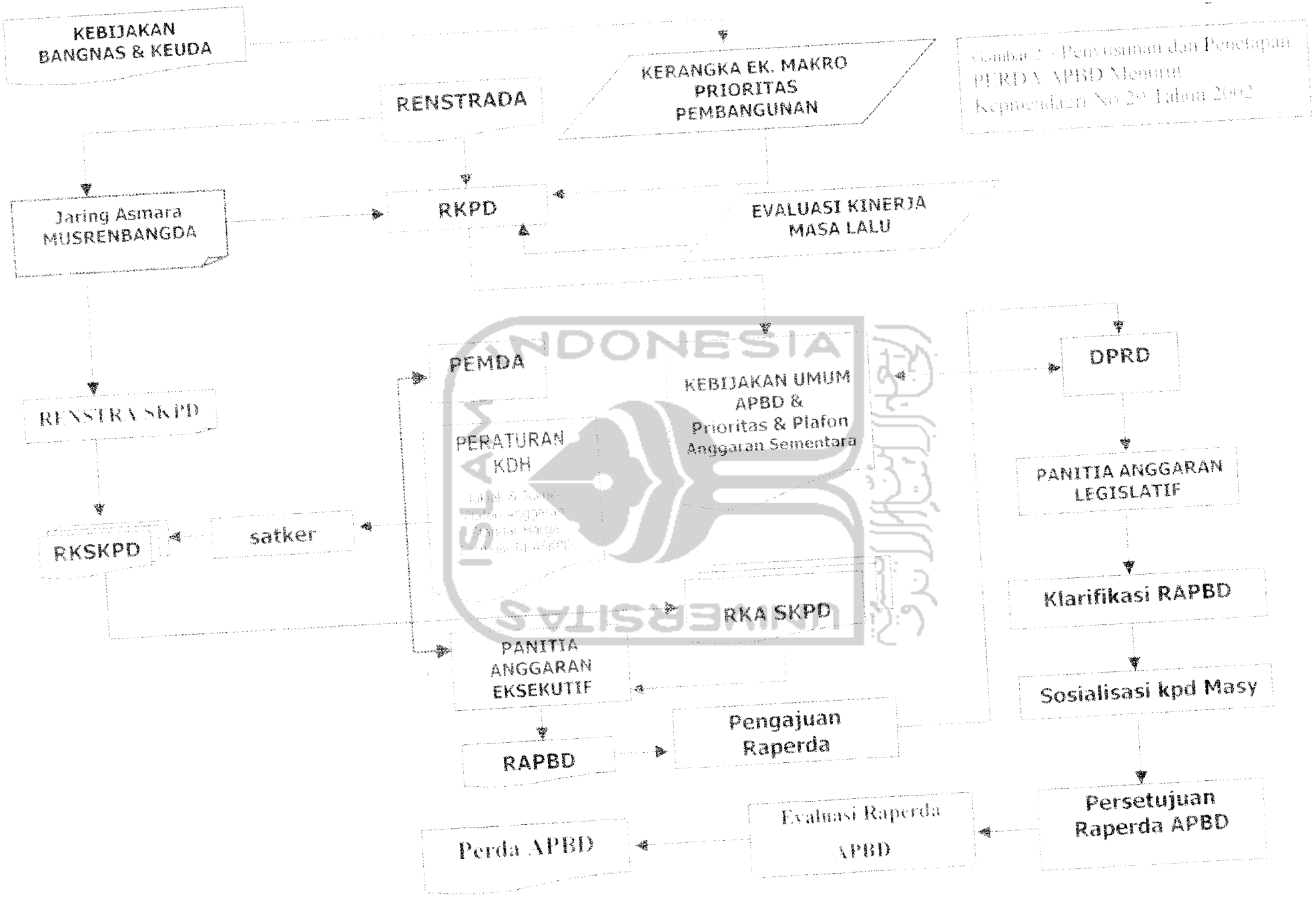
DPRD melakukan serangkaian pertemuan dengan masyarakat (pada Reses) dan kepada satuan kerja/satuan pelaksana (pada rapat DPRD tahun anggaran

2006, benar-benar merefleksikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten melalui Panitia Anggaran Eksekutif mengkaji dan menilai rencana anggaran yang diusulkan masing-masing satuan kerja apakah usulan mereka telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah digariskan. Kemudian Panitia Anggaran Eksekutif menyusun rancangan APBD tahun 2006 untuk dipertimbangkan oleh Bupati. Selanjutnya Bupati akan menyerahkan Rancangan APBD tersebut kepada DPRD. Rancangan APBD tersebut kemudian dibahas bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL) sambil tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Kemudian setelah selesai dibahas dan disetujui untuk menjadi Rancangan APBD Kabupaten Serang, RAPBD tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh Gubernur maka Bupati kemudian menetapkan RAPBD tersebut menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD.

Gambar 2.2 Alur Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran menurut UU Keuangan Negara





Gambar 2 - Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD Menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2002

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Menurut Kerlinger penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan berhubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Singarimbun,2004). Metode survei digunakan dengan maksud untuk menuliskan dan atau menyimpulkan beberapa aspek perilaku dari populasi yang diamati (Sigit, 1999).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Serang dengan mengambil objek penelitian APBD dan subjek penelitian Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Untuk dapat mencapai hasil penelitian yang dapat diyakini sebagai suatu kebenaran sangat erat berkaitan dengan metode yang digunakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini metode yang dianggap penting adalah gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Serang, variabel penelitian, populasi sampel pengumpulan data dan metode analisis data dengan penjelasan sebagai berikut.

3.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari enam Kabupaten/kota di Propinsi Banten, terletak dibagian barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan

pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan jarak ± 70 km dari Kota Jakarta (Ibukota Negara Indonesia).

Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5° 50' sampai dengan 6° 21' Lintang Selatan dan 105° 07' sampai dengan 106° 22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km.

Sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur dibatasi Kabupaten Tangerang
- Sebelah Barat dibatasi oleh kota Cilegon dan Selat Sunda
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang

Luas wilayah secara administrasi tercatat 1.734,28 Ha yang terbagi atas 34 (tigapuluh dua) Wilayah Kecamatan, 372 desa dan kelurahan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Serang

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Anyer	Anyer	155,93	8
2	Bandung	Bandung	51,30	7
3	Bates	Bates	12,07	11
4	Bunang	Bunang	26,17	7
5	Baljuraya	Baljuraya	99,50	10
6	Cinangka	Cinangka	30,46	10
7	Cikande	Cikande	96,51	12
8	Cikeusal	Cikeusal	88,25	13
9	Ciomas	Ciomas	111,13	11

10	Ciomas	Sukadiaro	48,83	16
11	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya	31,84	8
12	Curug	Curug	34,38	14
13	Curug	Curug	45,60	10
14	Cinangneng	Cinangneng	27,20	7
15	Jawilan	Jawilan	36,05	9
16	Kasemen	Kasemen	66,56	12
17	Kibin	Kibin	59,68	9
18	Kragilan	Kragilan	51,56	14
19	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	15
20	Lebak	Lebak	41,67	10
21	Mancak	Mancak	74,05	15
22	Pabuaran	Pabuaran	127,74	15
23	Padarincang	Padarincang	99,17	13
24	Pamarayan	Pamarayan	67,10	17
25	Petir	Petir	46,94	12
26	Pontang	Pontang	64,85	18
27	Pulo Ampel	Sumurpucung	52,51	8
28	Serang	Kaligandu	25,98	12
29	Taktakan	Taktakan	47,88	12
30	Tanara	Cerdasari	41,50	7
31	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	13
32	Tunjung Teja	Tunjung Teja	30,52	8
33	Waringinkurung	Pipitan	45,48	14
34	Waringinkurung	Waringinkurung	51,59	11

Sumber : Kecamatan dalam Angka

Dari jumlah wilayah sebanyak 34 kecamatan tersebut terdapat dataran-dataran pulau-pulau yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Serang yang terdata sebanyak 17 pulau diantaranya adalah Pulau Sangiang, Pulau Tondo, Pulau Panjang, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Dualian, Pulau Lima, Pulau Kubur dan lain-lain.

Kondisi Topografi Kabupaten Serang berada dalam kisaran ketinggian antara 0 sampai dengan 1778 diatas permukaan laut (dpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi bukan dataran dan berombak-bukit.

Ketinggian 0 m dpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka dipantai bagian selatan Selat Sunda dan ketinggian 1778 m dpl terdapat dipuncak Gunung Karang yang terletak disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten pandeglang. Pada umumnya (47,5 %) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 dpl.

Tabel 4.2 Ringkasan APBD Kabupaten Serang tahun 2014

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pendapatan Asli Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Pajak Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Retribusi Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang			
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
	Yang Dipisahkan Lain-Lain Usaha Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Lain-lain PAD Yang Sah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II	Dana Perimbangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Dana Alokasi Umum Sub-sah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Dana alokasi Khusus Rupiah			
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III	Keuangan dan Desentralisasi Bantuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dana Penyesuaian	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Dana Tunjangan Dana Tk. Provinsi			
	BKKBN			
	Dana Pegawai Dana DKP Dana			
	Pengadem CPNSD			
	Jumlah Pada I + II + III	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.2. Variabel Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi Kebijakan publik

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Singgih,2004). Populasi penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Singgih, 2004). Sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi, maksud dari mewakili adalah sebagai cerminan yang dapat dipandang menggambarkan secara maksimal keadaan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) yang terdiri dari tujuh belas orang, enam belas orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.

Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Serang yang bertugas antara lain untuk menerima, meneliti serta membahas Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan data-data dari satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian merumuskan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah

(RAPBD) dan melaporkan hasil penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Bupati.

Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) terdiri atas berbagai instansi sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah (*Planning*) yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana Pembangunan Tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD atau Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD, Program dan kegiatan.

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses penetapan anggaran (*Budgeting*) yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan.

3. Sekertariat Daerah (Setda)

   Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah (*Planning*) dan proses penetapan anggaran (*Budgeting*).

Karena hal-hal tersebut diatas serta peran dan fungsi PAE yang sangat strategis maka peneliti menetapkan PAE sebagai sampel yang digunakan didalam penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Data yang digunakan untuk menduduk permasalahan tersebut yaitu data diperoleh dari data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar Husein,2002:2). Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diadopsi oleh penulis dari penelitian sejenis yang telah disampaikan didalam bab II sub judul 2.4 penelitian sebelumnya. Penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti selama 3 minggu dari tanggal 14 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 dengan menggunakan model *Personally Administered Questionnaires* yaitu penyebaran kuesioner secara langsung dengan tatap muka sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*Response Rate*) sebesar 100%. Kuesioner yang berhasil disebarkan dan dikumpulkan untuk diolah dan kemudian dianalisa oleh peneliti berjumlah 16 buah.

Data-data lain yang bersifat sekunder dan terkait dengan penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji apakah ada pengaruh partisipasi masyarakat dan transparasi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopamah dan Mardisamo pada tahun 2003 dengan responden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian tersebut diatas dengan melakukan beberapa pengembangan atas objek dan subjek penelitian dan menggunakan kuesioner yang telah diadopsi untuk digunakan dalam skripsi ini.

menggunakan skala likert, akan mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negative yang dapat dinilai sebagai berikut

1) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
2) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
3) Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3
4) Setuju (S) diberi skor 4
5) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

3.4.2.5. Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan Valid shahih jika memiliki tingkat validitas yang tinggi sebaliknya jika instrumen memiliki tingkat validitas yang rendah maka instrumen dapat dikatakan kurang valid. Pengujian validitas bergunа untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun dapat mengukur dengan tepat suatu variabel yang akan diukur.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004). Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid.

Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total *item total correlation*. Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus teknik korelasi *product moment* (Sugiyono dan Effendi, 1995). Dimana perhitungan ini dilakukan dengan jalan mengkorelasikan antar skor tiap butir (X) dengan skor total (Y) yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2}\sqrt{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi person product moment

N = Jumlah sampel

$\sum X$ = Jumlah skor total

$\sum XY$ = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor butir

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor total

Untuk melihat tingkat signifikasi dari item-item yang di uji, nilai korelasi *product moment* (r hitung) dibandingkan dengan r tabel atau dengan membandingkan dengan nilai ketetapan yang telah disepakati yaitu 0,3 (Singarimbun, 2000). Jika nilai r hitung lebih besar dari 0,3 atau r tabel maka item dianggap valid.

Uji Validitasi kuesioner ini menggunakan program SPSS 11.00 dengan cara melihat tingkat signifikasi, dengan melihat nilai *Sign.* korelasi, item dianggap valid jika probabilitas atau *Sign.* lebih kecil dari α yang ditentukan yaitu 0,05

Tabel 3.3. **Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat**

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Signifikansi	Kesimpulan
1	0,05	0,000	Valid
2	0,05	0,000	Valid
3	0,05	0,000	Valid
4	0,05	0,000	Valid
5	0,05	0,000	Valid
6	0,05	0,000	Valid
7	0,05	0,000	Valid

Tabel V.4. **Hasil Uji Validitasi Variabel Transparansi Kebijakan Publik**

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Signifikansi	Kesimpulan
1	0,05	0,000	Valid
2	0,05	0,000	Valid
3	0,05	0,000	Valid
4	0,05	0,000	Valid
5	0,05	0,000	Valid

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diyakini atau diandalkan (Singarimbun dan Effendi 1995). Uji reliabilitas merupakan suatu cara untuk melihat apakah alat ukur (beruppa kuesioner) yang digunakan konsisten atau tidak. Apabila suatu alat pengukur dipakai dua kali atau lebih dan hasil pengukuran yang diperoleh konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel.

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha (Sunggumbun dan Effendi 1995). rumus alpha digunakan menaksir instrumen yang skornya bukan 1 dan 0

$$r_{11} = \left(\frac{k}{(k-1)}\right)\left(\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

σ_t^2 = varians total

Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tinggi atau rendahnya koefisien *Cronbach's alpha* yang dihasilkan dari proses pengujian. Nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0.5 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel/konsisten.

Uji Reliabilitas kuesioner ini menggunakan program SPSS 11.00 dengan cara melihat nilai *Cronbach's alpha*, item dianggap reliabel jika Nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1997)

Tabel 3.8 **Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat**

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Alpha	Kesimpulan
1	0,5	0,9000	**Reliabel**
2	0,5	0,9000	**Reliabel**
3	0,5	0,9000	**Reliabel**
4	0,5	0,9000	**Reliabel**
5	0,5	0,9000	**Reliabel**
6	0,5	0,9000	**Reliabel**
7	0,5	0,9000	**Reliabel**

Tabel 3.6 **Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik**

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Alpha	Kesimpulan
1	0,5	0,886	Reliabel
2	0,5	0,886	Reliabel
3	0,5	0,886	Reliabel
4	0,5	0,886	Reliabel
5	0,5	0,886	Reliabel

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2004) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Tujuannya adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pihak yang diamati yang tentu saja berasal dari kuesioner yang disebarkan. Analisis data yang dilakukan adalah mengumpulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi dari tanggapan-tanggapan yang telah diberikan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan membuat interval antara 1 sampai dengan 5 dan menggunakan rata-rata skor total jawaban persepsi responden secara umum dapat ditentukan dengan melihat letak rata-rata skor tersebut dalam interval kelas yang ditentukan.

[illegible]

Dari interval tersebut dapat dikatakan skala ordinal kriteria pendapat responden sebagai berikut:

1. Nilai interval 1,00 – 1,79 = penilaian sangat rendah/sangat tidak setuju
2. Nilai interval 1,80 – 2,59 = penilaian rendah/tidak setuju
3. Nilai interval 2,60 – 3,39 = penilaian cukup/netral
4. Nilai interval 3,40 – 4,19 = penilaian tinggi/setuju
5. Nilai interval 4,20 – 5,00 = penilaian sangat tinggi/sangat setuju

4.1. Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

4.1.1. Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat

1. Mengapa cara masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat perencanaan anggaran kegiatan di tingkat APBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	7 Orang	58,3 %
Yang menjawab Setuju (S)	3 Orang	41,7 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	16,7 %

Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	4 Orang	10 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	40 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
171	4,28	Sangat Setuju

sumber : Hasil pengolahan data oleh Peneliti

Interpretasi

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 68 % menyatakan sangat setuju dan sebanyak 5 orang atau sebesar 32 % menyatakan setuju hal ini berarti Pemkab Sragen sudah benar-benar memberikan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan umum. MPBD melalui musyawarah desa/kota perlu untuk mengidentifikasi dan merangkum usulan dari masyarakat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

2 Untuk saat ini saya masyarakat merasa saya dapat memahami strategi dan prioritas MPBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	9 Orang	18 %
Yang menjawab Setuju (S)	31 Orang	78 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	5 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	40 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
165	4,13	Sangat setuju

sumber : Hasil pengolahan data oleh Peneliti

Interpretasi :

Responden sebanyak sebelas orang atau sebesar 68,8 persen menyatakan setuju dan sebanyak tiga orang atau sebesar 18,8 % menyatakan sangat setuju hal ini mengartikan bahwa Pemkab Sleman mengetahui peranan aktor kunci dan saran yang disampaikan oleh masyarakat melalui proses musrenbang dalam menentukan strategi dan program APBD

5. Bagi saya partisipasi publik merupakan fase dalam rangka penyusunan APBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	4 Orang	25 %
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	62,5 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	16 Orang	100 %

Skor Total = Rata-Rata Kriteria

Setuju

Sumber: Data Diolah, Tahun 2016

Interpretasi :

Responden sebanyak sepuluh orang atau sebesar 62,5 % menyatakan setuju dan sebanyak empat orang atau sebesar 25 % menyatakan sangat setuju hal tersebut menunjukkan Pemkab Sleman menganggap penting peran partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan APBD Musrenbang adalah salah satu cara untuk memfasilitasi partisipasi tersebut

4. Masyarakat sekitar ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	4 Orang	18,8 %
Yang menjawab Setuju (S)	16 Orang	62,5 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	6,3 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	25 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
65	3,9	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah 2016

Interpretasi :

Responden sebanyak 16 orang atau sebesar 62,5 % menyatakan setuju dan sebanyak 4 orang atau sebesar 18,8 % menyatakan sangat setuju hal ini menunjukan bahwa Pemkab Serang terbuka dalam menanggapi dan menangani advokasi masyarakat perihal anggaran. Pemkab Serang pun senantiasa terbuka dalam menghadapi proses untuk rasa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Saya kira antara dewan masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	5 Orang	31,3 %
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	68,8 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	0 Orang	0 %

Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	2,5 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	40 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
163	4	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Interpretasi :

Responden sebanyak tujuh orang atau sebesar 17,5 % menyatakan setuju dan sebanyak lima orang atau sebesar 31,3 % menyatakan sangat setuju hal ini menunjukan bahwa Pemkab Serang senantiasa melakukan konsultasi dengan DPRD dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RAPBD

6. Saran dan kritik dari masyarakat saya (ita) dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	14 Orang	35 %
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	62,5 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	16 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
66	4,125	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Interpretasi :

Responden sebanyak sepuluh orang atau sebesar 62,5 % menyatakan setuju dan sebanyak empat orang atau sebesar 25 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa Pemkab Serang menganggap penting saran dan kritik dari masyarakat untuk dijadikan pertimbangan merevisi anggaran.

7. Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	3 Orang	18,8 %
Yang menjawab Setuju (S)	9 Orang	56,3 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	3 Orang	18,8 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	6,3 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	16 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
62	3,875	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2010

Interpretasi :

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3 % menyatakan setuju dan sebanyak tiga orang atau sebesar 18,8 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan APBD di sosialisasikan secara baik oleh Dewan dan Pemkab Serang.

4.1.2. Analisa Variabel Transparansi Kebijakan Publik

1. Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	6 Orang	37,5 %
Yang menjawab Setuju (S)	9 Orang	56,3 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	16 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
650	4,063	Sangat setuju

sumber : Data primer yang diolah, 2009

Interpretasi :

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3 % menyatakan setuju dan sebanyak enam orang atau sebesar 37,5 % menyatakan sangat setuju hal tersebut menunjukan bahwa Pemkab Serang sangat memahami bahwa pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi dalam penyusunan pelaksanaan maupun pengawasan APBD

2. Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	1 Orang	6,3 %
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	68,8 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	4 Orang	25 %

Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	3 Orang	15,8 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	19 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
58	3,05	Setuju

sumber : Data primer yang diolah, 2019

Interpretasi :

Responden sebanyak sebelas orang atau sebesar 57,8 % menyatakan setuju hal tersebut menunjukan bahwa Pendidik Serang telah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk dapat berhubungan dengan dokumen-dokumen publik yang telah di dengar (MMD)

Seperti pernyataan responden bahwasanya sependapat saja selama ini tepat waktu

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	11 Orang	57,5 %
Yang menjawab Setuju (S)	8 Orang	50,3 %
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	5,3 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	19 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
60	3,15	Sangat Setuju

sumber : Data primer yang diolah, 2019

Interpretasi:

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3 % menyatakan setuju dan sebanyak enam orang atau sebesar 37,5 % menyatakan sangat setuju bahwa pemahaman Ketua Pemilu Senang sebab sangat mencerna dan memberi kepuasan pertanggung jawaban sebesar 100% kepada tepat waktu untuk disampaikan kepada pihak keanggotaan DPRD.

4 Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara aspirasi rakyat

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	5 Orang	31,3 %
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	68,8 %
Yang menjawab Kurang Setuju (KS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0 %
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0 %
Total	16 Orang	100 %

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
85	4,25	Sangat Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Interpretasi:

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 68,8 % menyatakan setuju dan sebanyak lima orang atau sebesar 31,3 % menyatakan sangat setuju bahwa Ketua Pemilu Senang sangat memahami betapa pentingnya kebijakan transparansi anggaran untuk dapat mengakomodasi suara serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD

5. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi tersebut

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	5 Orang	19,2%
Yang menjawab Setuju (S)	12 Orang	46,2%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	8 Orang	30,8%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	3,8%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	26 Orang	100%

Skor Total	Rata-Rata	Kriteria
125	4,8	Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Interpretasi :

Responden menyatakan dari 26 responden yang memilih "S" (Setuju) sebanyak 12 orang menganggap bahwa Pemkab Sleman memahami dan mengangap penting adanya sistem informasi yang dapat meningkatkan transparansi didalam anggaran.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pembahasan Variabel Partisipasi Masyarakat

Dari seluruh pendapat yang telah serta interpretasi dari kepetingan penelitian dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa masyarakat Kabupaten Serang telah benar-benar dilibatkan dalam proses penyusunan dari tahapan awal APBD penyusunan rancangan APBD maupun dalam proses hasil APBD. Melalui wakil-wakil rakyat di DPRD aspirasi masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Dalam proses reses anggota dewan melakukan proses *hearing* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) bahkan kemudian dituangkan dan disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penyusunan rancangan APBD. Pemerintah daerah pun memiliki kanal Pos Pengaduan Masyarakat yang dikelola oleh bagian Humas Pemkab Serang yang menerima pengaduan, keluhan maupun usulan baik berupa surat tertulis secara langsung dari masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati Kabupaten Serang dalam kegiatan langsungan rutin yang berlangsung tiap satu minggu sekali. Bupati Serang juga membuka pengaduan keluhan maupun usulan melalui Layanan Pesan Singkat SMS (*Short Message Service*). Kemudian masyarakat pun dapat melakukan unjuk rasa/demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi.

Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Serang benar-benar menganggap penting adanya peran serta partisipasi masyarakat. Salah satu indikator lainnya

adalah pemerintahan masyarakat tentang pembangunan (masterplan) dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten yang mengandung berbagai macam elemen-elemen masyarakat dan aspek pemerintahan serta berbagai macam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada.

4.2.2. Pembahasan Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Dari seluruh tanggapan yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap pernyataan dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa Pemkab Serang sangat memahami serta mengerti apa pentingnya transparansi kebijakan publik dalam pemerintahan (governance). VPHD dan berusaha untuk dapat menyediakannya dengan baik, jelas dan dengan cara mengakses masyarakat adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang. Sebagai bukti adalah dapat diakses atas dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran oleh masyarakat luas. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serang maupun melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Serang pun telah memiliki situs web site sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kegiatan maupun program kerja pemerintah Kabupaten Serang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang disusun dan dituliskan penelitu merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut

1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Kabupaten Daerah Serang terhadap transparasi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka penelitu dapat menyusun dan menuliskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah **Baik**

Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap pola pertanyaan kuesioner. Bahwa masyarakat Kabupaten Serang telah benar-benar dilibatkan dalaban proses penyusunan arah

kebijakan umum APBD penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses revisi APBD melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang. Salah satunya adalah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

2. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah **Baik.**

Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap item pertanyaan kuesioner. Pemkab Serang sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan publik didalam penyusunan APBD dan berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik. Dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang.

5.2. Saran

Saran yang disusun oleh penulis merupakan pendapat penulis yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini demi mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pendapat ini dihasilkan selama melakukan kegiatan penelitian di Pemerintah Kabupaten Serang serta hasil analisis data dan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah disusun dan teori – teori yang terkait dengan penelitian ini.

5.2.1. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Menurut Mardiasmo (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara masyarakat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Kriteria-kriteria tersebut menurut persepsi Pemkab Serang telah dapat dipenuhi dengan baik.

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada semaksimal diperlahankan dan semaksimal dimungkinkan untuk terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan peraturan-peraturan daerah serta penambahan fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat Kabupaten Serang.
2. Tingkat transparansi kebijakan publik yang sudah ada semaksimal dikembangkan menuju kearah yang lebih baik dan lebih transparan. Karena transparansi merupakan salah satu semangat dan *[illegible]*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim (editor), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (sesuai UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004), UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.

--------, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Bantuan Dan pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

Edie Wibowo, Lanny Hs dan Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Good Governance Dan Good Corporate Governance*, YPPM, Yogyakarta, 2004.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, *Kepmendagri Otonomi Daerah Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta, 2002.

Lines Rowan and Maurice Pendleburry, *Public Sector Economics*, Addison Wesley Pitman Publishing, London, 2000.

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

--------, *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

--------, *PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH : Implementasi Pasal 23E, 23F dan 23G UUD Sebagai Landasan Konstitusi Terhadap Jaminan Akuntabilitas publik*, JAM, 2000, 5:582.

--------, Sopyanah, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengendalian Proses Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Proceding Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003, Hal:1-1178.

Pemerintah Kabupaten Serang, *RINCIAN Penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja anggaran 2006*, Pemkab Serang, Serang, 2006.

Reksohadiprodjo Rosseno, *Ekonomi Pemerintahan*, Edisi Tiga BPFE, Yogyakarta, 1999.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.

--------, *Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.

L A M P I R A N

Lampiran 1

Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Correlations

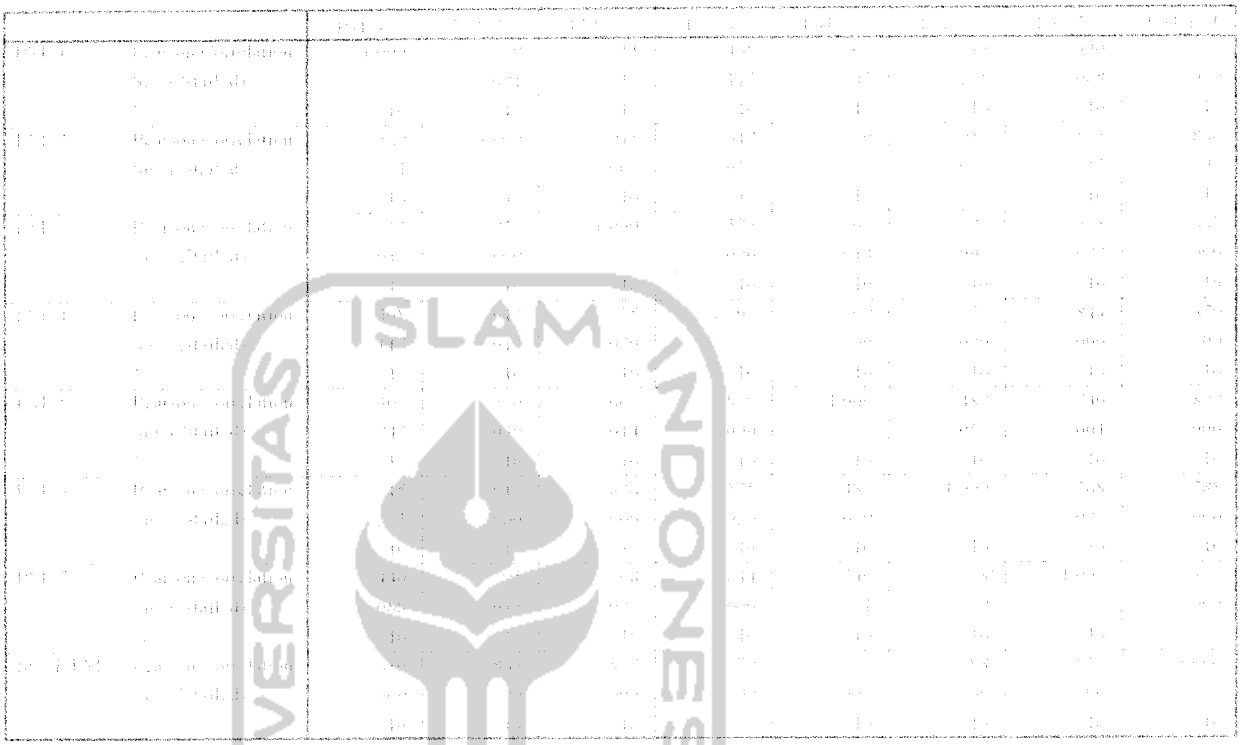
KPT_1	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						
KPT_2	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						
KPT_3	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						
KPT_4	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						
KPT_5	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						
KPT_TOTAL	Pearson						
	Sig. (2-						
	N						

Lampiran 2

Uji Reliabilitas Variabel Transparansi kebijakan Publik

Lampiran 3

Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat



Lampiran 4

Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Lampiran 5

Frequency Table Partisipasi Masyarakat

PM_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Sekolah	1	1.0	1.0	2.0
	SD	3	3.0	3.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA	59	59.0	59.0	75.0
	Sarjana Muda	4	4.0	4.0	79.0
	Sarjana	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PM_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Sekolah	1	1.0	1.0	2.0
	SD	3	3.0	3.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA	59	59.0	59.0	75.0
	Sarjana Muda	4	4.0	4.0	79.0
	Sarjana	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PM_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Sekolah	1	1.0	1.0	2.0
	SD	3	3.0	3.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA	59	59.0	59.0	75.0
	Sarjana Muda	4	4.0	4.0	79.0
	Sarjana	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PM_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Belum Sekolah	1	1.0	1.0	2.0
	SD	3	3.0	3.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA	59	59.0	59.0	75.0
	Sarjana Muda	4	4.0	4.0	79.0
	Sarjana	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PM_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	1	1.0	1.0	1.0
	Belum Sekolah	1	1.0	1.0	2.0
	SD	3	3.0	3.0	5.0
	SMP	11	11.0	11.0	16.0
	SMA	59	59.0	59.0	75.0
	Sarjana Muda	4	4.0	4.0	79.0
	Sarjana	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PM_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Netral	10	9.8	9.8	11.8
	Setuju	71	69.6	69.6	81.4
	Sangat Setuju	19	18.6	18.6	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

PM_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang Setuju	4	3.9	3.9	4.9
	Netral	9	8.8	8.8	13.7
	Setuju	71	69.6	69.6	83.3
	Sangat Setuju	17	16.7	16.7	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Lampiran 6

Frequency Table Transparansi Kebijakan Publik

KP_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Netral	9	8.8	8.8	9.8
	Setuju	71	69.6	69.6	79.4
	Sangat Setuju	21	20.6	20.6	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

KP_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	2.9
	Netral	11	10.8	10.8	13.7
	Setuju	71	69.6	69.6	83.3
	Sangat Setuju	17	16.7	16.7	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

KP 3

KP 4

KP 5

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 7

Frequency Table

Jenis Kelamin

Umur

Lulusan Pendidikan Anggota

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Lampiran 5. Rekapitulasi Kuesioner

REKAPITULASI DATA PENELITIAN 16 RESPONDEN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PEMDA SERANG

No. Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Partisipasi Pembuatan Publik							Partisipasi Masyarakat							
				PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	Total	X	PM 1	PM 2	PM 3	PM 4	PM 5	PM 6	PM 7	PM 8
1	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Anggota	5	4	5	5	5	24		5	4	4	3	3	5	4	23
2	Laki-Laki	51 - 55 tahun	Anggota	4	5	4	4	4	21		5	4	4	4	4	4	5	26
3	Laki-Laki	51 - 55 tahun	Ketua	4	4	4	4	4	20		5	5	5	5	5	5	5	35
4	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	2	2	3	3	3	21
5	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Sekretaris	5	4	4	4	4	21		5	5	5	5	5	5	5	35
6	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Anggota	5	4	4	4	4	21		4	3	3	3	4	4	4	27
7	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Ketua	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
8	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
9	Laki-Laki	51 - 55 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	4	3	4	4	4	27
10	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
11	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
12	Laki-Laki	51 - 55 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	5	4	4	4	4	4	29
13	Perempuan	51 - 55 tahun	Anggota	5	5	5	5	5	25		5	5	5	5	5	5	5	35
14	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Anggota	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
15	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Sekretaris	4	4	4	4	4	20		4	4	4	4	4	4	4	28
16	Laki-Laki	41 - 45 tahun	Anggota	5	4	4	4	4	21		5	5	4	4	4	4	4	30
17	Laki-Laki	46 - 50 tahun	Anggota	5	4	5	5	5	24		5	5	5	5	5	5	5	35

Lampiran 9
Kuesioner Partisipasi Masyarakat

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	RR	TS	STS
2	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD	SS	S	RR	TS	STS
3	Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam angka menyusun APBD	SS	S	RR	TS	STS
4	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran	SS	S	RR	TS	STS
5	Saya kira antara dewan dan masyarakat dan eksekutif melakukan konsultasi dalam rancangan APBD	SS	S	RR	TS	STS
6	Saran dan kritik dari masyarakat saya kira dapat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran	SS	S	RR	TS	STS
7	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya eksekutif mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi	SS	S	RR	TS	STS

Keterangan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
RR : Ragu-Ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak setuju

Lampiran 10
Kuesioner Transparansi Kebijakan Publik

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	SS	S	RR	TS	STS
2	Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran	SS	S	RR	TS	STS
3	Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu	SS	S	RR	TS	STS
4	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara usulan rakyat	SS	S	RR	TS	STS
5	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	RR	TS	STS

Keterangan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
RR : Ragu-Ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak setuju